

# REFORMASI BIROKRASI MENUJU GOOD GOVERNANCE

## BUREAU REFORM TOWARDS GOOD GOVERNANCE

**Diani Indah**

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

---

### ABSTRAK

Globalisasi di berbagai bidang kehidupan terutama kemajuan teknologi informasi dan transformasi telah mendorong perubahan kebutuhan masyarakat, serta mendorong birokrasi pemerintah untuk dapat mereformasi diri ke arah good governance. Unsur-unsur utama birokrasi pemerintahan yang bercirikan good governance yaitu: Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, Aturan hukum dan Efektivitas dan efisiensi. Adapun tindakan pemerintah sebagai birokrasi pemerintahan yang diharapkan dapat mewujudkan implementasi dan operasionalisasi dari prinsip-prinsip good governance yang antara lain :dapat berfungsi dengan baik dan tidak memboroskan uang rakyat yang terkumpul melalui sistem perpajakan., dapat menjalankan fungsinya berdasarkan norma-norma standar etika dan moralitas yang berkeadilan, mampu menghormati legitimasi konvensi konstitusional yang mencerminkan kedaulatan rakyat (demokrasi), memiliki daya tanggap terhadap berbagai variasi tuntutan aspirasi dan partisipasi yang berkembang dalam masyarakat serta bersifat positif atas pertanyaan masyarakat mengenai berbagai kebijaksanaan yang dijelankannya.

**Kata kunci: Globalisasi, good governance, birokrasi pemerintahan.**

### ABSTRACT

*Globalization in various areas of life , especially the advancement of information technology and the transformation has encouraged the changing needs of the community , as well . encourage governments as public administration and public management to be able to reform itself in the direction of good governance. The main elements of the government . public administration and public management are characterized by good governance : Accountability . Transparency , openness, rule of law and the effectiveness and efficiency . As for the government's actions as public administration and public management are expected to realize the implementation and operationalization of the principles of good governance among others : to function properly and not waste public money collected through the tax system, can perform its functions based on standard norms ethics and morality with justice, able to respect the legitimacy of the constitutional convention that reflects the sovereignty of the people ( democracy ) , has a wide variety of responsiveness to the aspirations and demands of the growing participation in the community and society are positive to the question regarding the various policies being operated.*

**Keywords:** *globalization, good governance , public administration and public management.*

### Pendahuluan

Perubahan besar di sector administrasi public yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia terjadi pada dekade 1990-an. Kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi telah menimbulkan gejala globalisasi di berbagai bidang kehidupan terutama kemajuan teknologi informasi dan transformasi yang tidak terbendung dan menembus sekat sekat

hubungan sosial, ekonomi dan budaya antar bangsa-bangsa.

Globalisasi merupakan issue aktual yang perlu memperoleh perhatian bangsa-bangsa di dunia ini, terutama pada tahun 1994 telah dibentuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Perjanjian tersebut membuka cakrawala baru bagi dunia perdagangan internasional dengan penerapan sistem liberalisasi perdagangan, sehingga mendesak seluruh negara anggota WTO untuk menyetujui ketentuan-ketentuan berkenaan dengan perdagangan bebas. Lahirnya sistem perdagangan bebas, berdampak pada perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai tatanan kegiatan ekonomi, sosial, politik, budaya serta sektor publik lainnya dan berimplikasi pada berkembangnya birokrasi pemerintahan sebagai suatu ilmu dan praktek menuju kearah kehidupan manusia yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.

## 2. Konsep Good Governance

Good governance atau pemerintahan yang baik merupakan issue yang penting dalam pengelolaan birokrasi pemerintahan. Tuntutan gencar dari masyarakat kepada pemerintah untuk baik, sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat dan globalisasi.

Kemajuan ilmu dan teknologi serta perubahan sosial dan ekonomi telah mendorong perubahan kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pemerintah untuk menyediakan berbagai fasilitas dalam upaya mempermudah mewujudkan kebutuhan-kebutuhannya, karena itulah pemerintah harus memiliki good governance, atau masyarakat menuntut agar good governance dapat ditampilkan administrasi publik serta manajemen publik.

Tuntutan masyarakat itu harus direspon oleh pemerintah, atau birokrasi pemerintahan dengan melakukan berbagai perubahan pada penyelenggaraannya yang baik, baik secara global ataupun secara fungsional.

Administrasi publik merupakan suatu proses kerjasama untuk mencapai tujuan sektor publik. Di Indonesia konsep administrasi negara oleh kebanyakan penulis dianggap sama dengan administrasi publik. Tetapi sesungguhnya konsep administrasi publik lebih luas dari pada konsep administrasi negara. Tetapi sesungguhnya administrasi publik tidak hanya membahas administrasi negara atau administrasi pemerintahan tetapi juga membahas administrasi non negara yang bersifat nirlaba, atau bersifat sukarela, seperti organisasi keagamaan, organisasi sosial, dan yayasan (Kasim; 1998:6).

Manajemen merupakan proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain (Robbins&Coulter;1999:8). Dengan mengacu kepada konsep manajemen tersebut, yang dimaksud dengan manajemen publik adalah proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja dalam sektor publik agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain (pejabat negara dan pejabat negeri).

Adapun yang dimaksud dengan sektor publik mencakup hal-hal berikut :

- a) Keseluruhan aparatur pemerintah yang biasa disebut dengan government atau bureaucracy.
- b) Hubungan kerja dan mekanisme dalam aparatur pemerintah dimana juga mempunyai hubungan kerja dengan keenam lembaga tinggi negara
- c) Pendayagunaan aparatur pemerintah : ketatalaksanaan, kelembagaan dan personil.
- d) Pelayanan masyarakat dari pemerintah, organisasi masyarakat dan aparatur perkonomian negara (khususnya BUMN - BUMD). Dengan perkataan lain sektor publik berarti pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah atau dengan bahasa akademis disebut

manajemen pelayanan masyarakat (Sorjono;1995:31).

Dengan demikian manajemen pelayanan masyarakat identik dengan manajemen publik.

Kata manajemen pelayanan masyarakat membawa lingkup manajemen yang mungkin mempunyai kawasan :

- a) Keseluruhan proses manajemen dari mulai perencanaan sampai pengawasan
- b) Keseluruhan fungsi manajemen termasuk koordinasi, pengambilan keputusan, wawasan dan sebagainya
- c) Proses dan perumusan kebijaksanaan,
- d) Menyelesaikan pekerjaan untuk orang lain, sehingga orang lain puas akan hasil pekerjaannya

Dalam manajemen pelayanan yang bertolak dari sektor publik. ada anggapan bahwa pemerintah mempunyai tugas umum pemerintahan yang berupa fungsi-fungsi :pelayanan untuk masyarakat ;memberikan kemudahan kepada masyarakat, memberikan izin kepada masyarakat; membina masyarakat; membimbing masyarakat; pengawasan; pengaturan dan pengayoman dan perlindungan masyarakat (Sorjono;1995:31).

Dihubungkan dengan konsep Reinventing Government (Osborne& Gaebler : 1992) maka sebenarnya merupakan perubahan cara berpikir dan bertindak dari pemerintah untuk tidak melulu menyandarkan anggaran pendapatan negara yang bersumber kepada pajak akan tetapi dengan jiwa wirausaha berusaha untuk mewujudkannya ke dalam kebijaksanaan yang pada gilirannya memperkuat sektor publik.

Istilah governance secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengarahan, pembinaan atau "*gilding governance*" yakni suatu proses dalam mana suatu sistem sosial ekonomi atau sistem organisasi kompleks lainnya dikendalikan dan diatur (Nisjar;1997:135).Dengan demikian yang

dimaksud dengan governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam rangka penyediaan barang-barang publik dan pelayanan publik. Proses penyediaan barang-barang publik dan pelayanan publik disebut governance atau pemerintahan, sedangkan praktek terbaik disebut good governance.

Konsep good governance menunjukkan adanya interaksi timbal balik antara tiga komponen yaitu pemerintah, masyarakat serta swasta. Dalam interaksinya governance mempunyai tiga kaki, yaitu : economic governance, political governance dan administrative governance

Economic governance merupakan proses pembuatan keputusan serta interaksi penyelenggaraan ekonomi dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Political governance merupakan proses pembuatan keputusan untuk merumuskan kebijakan. Dan administratif governance adalah sistem implementasi proses kebijakan. Karena itulah instifusi governance meliputi tiga domain, yaitu negara atau pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, ketiga domein tersebut melakukan interaksi sesuai dengan fungsi masing-masing.

Institusi pemerintah menciptakan situasi politik serta hukum yang kondusif. Sektor swasta menciptakan pekerjaan serta pendapatan, dan masyarakat berperan positif melakukan Interaksi dalam aktivitas sosial, politik dan ekonomi serta mengajak kelompok kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial, politik dan ekonomi.

Negara atau pemerintah sebagai salah satu unsur governance, didalamnya termasuk lembaga politik, sektor publik. Sektor swasta termasuk perusahaan swasta, market. Sektor swasta dapat dibedakan dengan masyarakat karena mempunyai pengaruh kebijakan dalam aktivitas, sosial, politik, dan ekonomi. Masyarakat terdiri dari individu dan kelompok balk yang terorganisasi maupun yang tidak yang berinteraksi dalam aktivitas sosial, politik dan ekonomi dengan aturan formal atau

tidak formal, seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas maka good governance mengandung dua pengertian, yaitu :

- 1) Nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial
- 2) Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, maka good governance berorientasi kepada :

- 1) Orientasi ideal negara, yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional.
- 2) Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, efektif efisien dalam melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. Orientasi pertama mengacu falsafah pemerintahan yang demokratis dalam kehidupan negara dengan elemen konstituen sebagai berikut :
  - a) Legitimasi artinya pemerintah yang dipilih rakyat;
  - b) Akuntabilitas artinya pertanggung jawaban;
  - c) Hak azasi manusia,
  - d) Otonomi;
  - e) Pembagian kekuasaan;
  - f) Kontrol masyarakat

Selanjutnya orientasi kedua sangat tergantung sampai sejauhmana pemerintah berfungsi secara efektif dan efisien dalam mencapai atau mewujudkan tujuan nasional. Hal ini berkaitan dengan landasan operasional. Dengan demikian good governance merupakan hubungan sinergis antara ketiga domein, yaitu negara atau pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

Semakin menyatu ketiga domein, maka semakin sinergis.

Karakteristik good governance menurut UNDP (1996) adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya partisipasi masyarakat, artinya setiap warga negara mempunyai suara keputusan, baik langsung atau tidak langsung dibangun atas kebebasan berasosiasi secara konstruktif;
- 2) Rule of law, artinya memiliki kerangka hukum yang jelas dan tegas, mencerminkan keadilan, dilaksanakan tanpa pandang bulu
- 3) Transparansi, artinya dibangun atas kebebasan arus informasi, proses-proses lembaga dalam menyusun informasi dan informasi secara langsung harus dipahami dan dimonitor.
- 4) Responsifness, artinya lembaga-lembaga yang melayani warga negara atau elemen masyarakat lainnya harus bertanggung jawab;
- 5) Orientasi pada konsensus, artinya menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh yang terbaik serta untuk kepentingan yang lebih luas, karena itulah perlu konsensus bersama;
- 6) Equity, artinya semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan serta menjaga kesejahteraan mereka,
- 7) Efektivitas dan efisiensi, artinya proses dari lembaga-lembaga dalam menghasilkan, sesuai dengan berbagai sumber yang tersedia,
- 8) Accountability. artinya para pembuat keputusan baik pemerintah, swasta, ataupun masyarakat bertanggungjawab pada publik dalam lembaga-lembaga stakeholders.
- 9) Strategic mission, artinya para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dalam pengembangan

manusia yang luas dan jauh kedepan (Tjokroamidjojo;2000:80).

Kesembilan karakteristik good governance itu saling memperkuat dan tidak bisa berdiri sendiri. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintah, administrasi publik atau manajemen publik yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara ke tiga domein yaitu negara, swasta dan masyarakat. Oleh karena itulah good governance meliputi sistem administrasi negara, maka upaya mewujudkan good governance merupakan upaya untuk melakukan penyempurnaan pada sistem administrasi negara yang berlaku pada negara secara menyeluruh. Jika dilihat dari ke tiga domain good governance, negara memegang peranan penting mengingat fungsinya sebagai pengatur dalam memfasilitasi domein sektor swasta dan masyarakat, serta berfungsi sebagai administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peranan pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi dapat dihindarkan. Mengingat alasan tersebut, upaya-upaya perwujudan kearah good governance dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan negara dan bersamaan dengan itu dilakukan upaya-upaya pembenahan penyelenggaraan pemerintahan.

Dari aspek pemerintahan, good governance dapat dilihat melalui beberapa indikasi penting sebagai berikut :

- 1) Hukum atau kebijakan, artinya hal ini ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik, dan ekonomi.
- 2) Administratif competence dan transparency, artinya kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara

efisien, penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model administratif serta keterbukaan informasi.

- 3) Desentralisasi, artinya desentralisasi regional dan dekonsentrasi departemen.
- 4) Penciptaan pasar yang kompetitif penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan usaha kecil dalam segmen pasar, deregulasi dari kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan makro ekonomi.

Dalam kaitannya dengan kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan good governance, menurut Mustopadidjaya (2000:12), perlu diciptakan suatu sistem birokrasi dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Memiliki struktur yang sederhana, dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara arief, efisien dan efektif
- 2) Mengembangkan hubungan kemitraan antara pemerintah dengan setiap unsur dalam masyarakat yang bersangkutan.
- 3) Memahami dan komit akan manfaat dan anti pentingnya tanggungjawab bersama dan kerjasama dalam snafu keterpaduan serta sinergisme dalam pencapaian tujuan.
- 4) Adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong terciptanya motivasi, kemampuan dan keberanian menanggung resiko, berinisiatif, partisipatif yang telah diperhitungkan secara realistis dan rasional.
- 5) Adanya kepatuhan dan ketaatan terhadap nilai-nilai internal (kode etik) administrasi publik, juga terhadap nilai-nilai etika dan moralitas yang diakui dan dijunjung tinggi secara bersama-sama dengan masyarakat yang dilayani.



- 6) Adanya pelayanan administrasi publik yang berorientasi kepada masyarakat yang dilayanai, inklusif, mudah dijangkau, equitable, tidak bermuka dua, tidak menerapkan standar ganda, profesional, tidak memihak dan berfokus pada kepentingan masyarakat.

Governance sektor publik ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan hukum, mendorong kesejahteraan yang berkeadilan yang dilakukan masyarakat, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat. Dalam Good governance dituntut suatu birokrasi publik yang efisien, efektif. Juga dituntut private sektor governance yang efisien dan kompetitif, dan tugas pembenahan governance sektor swasta menjadi tanggungan sektor publik.

Selanjutnya mengenai sektor publik governance preskripsi reformasi birokrasinya dapat diambil dari prinsip-prinsip Reinventing Government dari Osborne dan Gaebler (1992:25) walaupun merupakan model restrukturasi, reformasi ala Amerika, namun dapat dipakai sebagai prinsip-prinsip reformasi birokrasi pemerintahan Indonesia. Semua prinsip itu cukup valid sebagai rekomendasi reformasi birokrasi Indonesia menuju good governance dan sebagai langkah awal menuju good governance yaitu perlu adanya clean government yakni pemerintah yang bersih, baik bisa berwibawa atau efektif. Dalam clean government ada tiga sub agenda penting, yaitu :

- 1) Kearah pemerintahan yang bersih (bebas dari KKN)
- 2) Penerimaan dan penggunaan uang/dana rakyat (disiplin budget, perlu dihapus adanya public fund diluar budget, cenderung penerimaan dan penggunaannya oleh kemandirian pemerintah.
- 3) Penguatan fungsi pengawasan.

Bagi Indonesia clean government adalah suatu komponen penting reformasi birokrasi menuju good governance. Selanjutnya reformasi sangat diperlukan untuk birokrasi atau institusi sektor swasta,

sebagai tanggung jawab sektor publik terutama dalam menyalurkan institusi sektor swasta (badan usaha swasta) di Indonesia tidak dikelola secara corporate culture yang sehat, terutama sektor perbankan.

Selanjutnya Tjokroamidjojo (2000:75) mengemukakan bahwa good governance, khususnya dalam kata good/balk, berintegritas dari pelaksanaan governance itu apabila governance balk dalam pemerintahan, badan usaha maupun kegiatan organisasi masyarakat. dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut :

- (1) Akuntabilitas (accountability);
- (2) Transparansi (transparency);
- (3) Keterbukaan (openness);
- (4) Aturan hukum (rule of law);
- (5) Hak azasi manusia (human right).

Akuntabilitas merupakan tanggung gugat dari penyelenggaraan, dari governance yang dilakukan. Menurut LAN akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang meminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas adalah prinsip utama good governance.

Transparansi yaitu dapat diketahuinya oleh banyak pihak yang berkepentingan : mengenai perumusan kebijaksanaan dari pemerintah, organisasi, badan usaha, seleksi jabatan melalui fit and proper test oleh lembaga balk perwakilan pemerintah atau perusahaan. Tender pelelangan dalam pelaksanaan procurement pelaksanaan anggaran pemerintah, maupun dalam perusahaan dan lain-lain dilakukan secara transparan.

Transparansi. Dalam pemerintahan yang balk akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, balk ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang proses perumusan kebijaksanaan publik dan tindakan pelaksanaannya dengan kata lain

segala tindakan dan kebijaksanaan pemerintah baik di pusat maupun di daerah harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum.

Keterbukaan. Pemberian informasi secara terbuka, terbuka untuk open free suggestion, dan terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk perbaikan. Keterbukaan bisa meliputi bidang politik (proses politik), ekonomi (kebijaksanaan dan transaksi ekonomi), dan pemerintahan (perumusan kebijakan, pengangkatan dalam jabatan). Diketuainya kekayaan pejabat, pimpinan perusahaan bisa dilihat sebagai dijalankannya prinsip keterbukaan. Keterbukaan disini mengacu kepada terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan. Pemerintah yang baik yang bersifat transparan dan terbuka akan memberikan informasi data yang memadai bagi masyarakat sebagai bahan untuk melakukan penilaian atas jalannya pemerintahan.

Aturan hukum. prinsip rule of law. Keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha yang menyangkut masyarakat, pihak ketiga dilakukan berdasarkan hukum atau peraturan yang sah. Jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Juga dalam social economic transaction, penyelesaian konflik berdasarkan hukum. Institusi hukum yang bebas, dan kinerjanya yang terhormat penting dalam good governance. Dasar-dasar dan institusi hukum yang baik sebagai infrastruktur yang baik. Aturan hukum dapat juga disini diartikan bahwa, good governance mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Karena itulah setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan harus dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang sudah

melembaga dan diketahui oleh masyarakat umum, serta memiliki kesempatan untuk mengevaluasinya.

Hak azasi manusia Adanya perlakuan adil atau perlakuan kesetaraan. Ini berlaku bagi pemerintah kepada masyarakat dalam pelayanan publik, perusahaan kepada pelanggan dan lain sebagainya Mengenai HAM bagi pemerintah artinya mengusahakan tidak adanya perlakuan-perlakuan yang melanggar HAM. Dengan mengacu kepada uraian di atas, berikut ini akan dikemukakan beberapa unsur utama yang dapat memberikan gambaran bagaimana administrasi publik atau manajemen publik yang bercirikan good governance. yaitu sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas artinya adalah kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk bertindak selaku penanggung jawab atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya Unsur ini merupakan inti dari pemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas aparatur pemerintahan ini terdiri dari politik, keuangan dan hukum;
- 2) Transparansi artinya pemerintah yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah. Segala kebijaksanaan pemerintah harus dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum;
- 3) Keterbukaan artinya terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan. Pemerintah akan memberikan informasi data yang memadai bagi masyarakat sebagai bahan untuk melakukan penilaiannya atas jalannya pemerintahan
- 4) Aturan hukum artinya bahwa good governance mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan

masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh;

- 5) Efektivitas dan efisiensi. Artinya proses dari lembaga-lembaga dalam menghasilkan, sesuai dengan berbagai sumber yang tersedia.

Selanjutnya beberapa tindakan pemerintah sebagai administrasi publik atau manajemen publik yang diharapkan dapat mewujudkan implementasi dan operasionalisasi dari prinsip-prinsip good governance antara lain adalah :

- 1) Pemerintah sebagai administrasi publik atau manajemen publik diharapkan dapat berfungsi dengan baik dan tidak memboroskan uang rakyat yang terkumpul melalui sistem perpajakan.
- 2) Pemerintah sebagai administrasi publik atau manajemen publik dapat menjalankan fungsinya berdasarkan norma-norma standar etika dan moralitas yang berkeadilan.
- 3) Pemerintah sebagai administrasi publik atau manajemen publik mampu menghormati legitimasi konvensi konstitusional yang mencerminkan kedaulatan rakyat (demokrasi).
- 4) Pemerintah sebagai administrasi publik atau manajemen publik memiliki daya tanggap terhadap berbagai variasi tuntutan aspirasi dan partisipasi yang berkembang dalam masyarakat serta bersifat positif alas pertanyaan masyarakat mengenai berbagai kebijaksanaan yang dijalkannya.

Oleh karena itu jelaslah bahwa untuk melaksanakan prinsip-prinsip good governance, pemerintah sebagai administrasi publik atau manajemen publik harus memiliki perilaku yang bertanggung jawab, sekaligus menciptakan mekanisme akuntabilitas maupun struktur kelembagaan bagi berkembangnya partisipasi masyarakat.

### 3. Penutup

Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perubahan sosial dan ekonomi telah mendorong perubahan kebutuhan masyarakat, serta mendorong pemerintah sebagai birokrasi pemerintahan untuk menyediakan berbagai fasilitas dalam upaya mempermudah mewujudkan kebutuhan-kebutuhannya, karena itulah pemerintah dituntut untuk dapat mereformasi diri ke arah good governance.

Unsur-unsur utama birokrasi pemerintahan yang bercirikan good governance yaitu: akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, aturan hukum dan efektivitas dan efisiensi. Adapun tindakan pemerintah sebagai birokrasi pemerintahan yang diharapkan dapat mewujudkan implementasi dan operasionalisasi dari prinsip-prinsip good governance yang antara lain :

- 1) Dapat berfungsi dengan baik dan tidak memboroskan uang rakyat yang terkumpul melalui sistem perpajakan.
- 2) Dapat menjalankan fungsinya berdasarkan norma-norma standar etika dan moralitas yang berkeadilan.
- 3) Mampu menghormati legitimasi konvensi konstitusional yang mencerminkan kedaulatan rakyat (demokrasi)
- 4) Memiliki daya tanggap terhadap berbagai variasi tuntutan aspirasi dan partisipasi yang berkembang dalam masyarakat serta bersifat positif alas pertanyaan masyarakat mengenai berbagai kebijaksanaan yang dijalkannya. Karena itulah untuk menjalankan good governance harus memiliki perilaku yang bertanggungjawab sekaligus menciptakan akuntabilitas publik.

### DAFTAR PUSTAKA

Henry. Nicholas, 1988, *Administrasi Negara Dan Masalah-Masalah Kenegaraan*, Jakarta: Rajawali.  
Hersey, Paul & Blanchard



- Kenneth, *Manajemen Perilaku Organisasi, Pendayagunaan Sumber Daya Manusia*, 1986, Jakarta: Erlangga,.
- Islamy, Irfan, 1989, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Jakarta : Bina Aksara.
- Mustopadidjaja, 2000, *Membentuk Kepemerintahan Lokal Yang Baik (Local Good Government) Dalam Menyongsong Otonomi Daerah*. Jakarta: LAN RI.
- Osborne, David and Plastrik, Peter, *Banishing Bureacracy (The Five Strategies for Reinventing Government)*, 1996, New York: Addison Wesley Publishing Company, Inc.
- Osborne, David and Gaebler, Ted, *Reinventing Government (How The Enter Preneurial Spirit is Transforming The Public Sector)*. 1992, Addison Wesley Publishing Company, Inc,
- Robbins & Coulter, *Manajemen*, 1999, Jakarta: PT. Prenhallindo,
- Tjokroamidjojo, Bintoro, *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*, 2000, Jakarta:UT